

# **DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH <sup>1</sup>**

Oleh : Baban Sobandi, SE.,M.Si. <sup>2</sup>

*This article explain about the result of the research on impact of the expansion of region, a case study in Kabupaten Tasikmalaya. The impacts studied are the ones over the development of social life and regions' infrastructures. This study finds out that the expansion of region maintains and even broadens the development gaps between urban and rural areas. The gaps occur in many sectors such as income, education, health, and public facilities. This study suggests that a feasibility study must be done prior to expansion of region so that no significant gaps occur between the old and new regional.*

## **Pendahuluan**

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah.

Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonstruksi dan desentralisasi.

Dalam perjalanannya, penekanan dalam orientasi pembangunan mengalami dinamika. Ketika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan kepada UU Nomor 5 Tahun 1974, pendulum penyelenggaraan pembangunan lebih mengutamakan sentralisasi, karena yang menjadi sasaran utama dari strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi, dan efisiensi diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma *Pareto-Optimal*. Kemudian, sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004), orientasi pembangunan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan melainkan kepada

<sup>1</sup> *Tulisan ini diangkat dari hasil kajian PKP2A.I LAN Tentang "Evaluasi Kinerja Pembangunan Pra dan Pasca Pemekaran Wilayah (Kasus Kabupaten Tasikmalaya). Penulis sebagai Peneliti Utama pada Kajian tersebut.*

<sup>2</sup> *Peneliti pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung*

kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, pendulum penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi.

Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut, daerah yang merasa diperlakukan kurang "adil" yang tercermin dari distribusi pendapatan dan tingkat pengembalian kekayaan yang dimiliki ke wilayah daerahnya, berusaha untuk mengembangkan daerah baru dan memisahkannya dari induknya. Dalam hal ini, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang terpecah, menjadi Kabupaten Tasikmalaya (sebagai induknya) dan Kota Tasikmalaya (sebagai pecahannya).

Sudah barang tentu, implikasi dari terjadinya pemekaran daerah tersebut, dirasakan dalam semua dimensi kehidupan penyelenggaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan para pejabat di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, terdapat ketimpangan yang signifikan antara potensi yang dimiliki oleh wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan wilayah Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini, sebagian besar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya sebelum dimekarkan berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Apabila hal ini benar dan berdampak

terhadap penurunan kesejahteraan Kabupaten Tasikmalaya, maka pemekaran daerah yang dilakukan dapat dinilai tidak efektif, apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban daerah induk untuk membina daerah baru, sementara kemampuan yang dimiliki oleh daerah induk jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah baru.

Dalam Bidang Sosial, keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dapat dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan dilihat dari indikator kinerja sektor pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas, indikator ini secara operasional dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Rasio ini secara teoritis berkorelasi positif dengan daya serap murid terhadap materi ajaran yang diberikan. Artinya, makin tinggi rasio guru terhadap murid, maka makin baik daya serap murid terhadap materi yang diajarkan, sehingga makin tinggi kualitas pendidikan yang didapatkan.

Indikator kesehatan yang paling utama adalah pemerataan kesehatan bagi masyarakat. Indikator ini dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap seluruh penduduk. Makin tinggi rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk maka makin besar peluang masyarakat secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan yang makin baik, sehingga kualitas kesehatan masyarakat secara umum semakin baik.

Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang secara empirik mempunyai peran penting ini antara lain adalah sarana dan prasarana perhubungan serta

sarana dan prasarana penerangan. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini didasari pemikiran, makin panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota dan desa juga makin tinggi.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, sektor listrik merupakan sektor yang penting dan memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah pelanggan listrik terhadap keseluruhan rumah tangga dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

#### **Pemekaran Wilayah dan Kinerja Pembangunan (Kasus Kabupaten Tasikmalaya)**

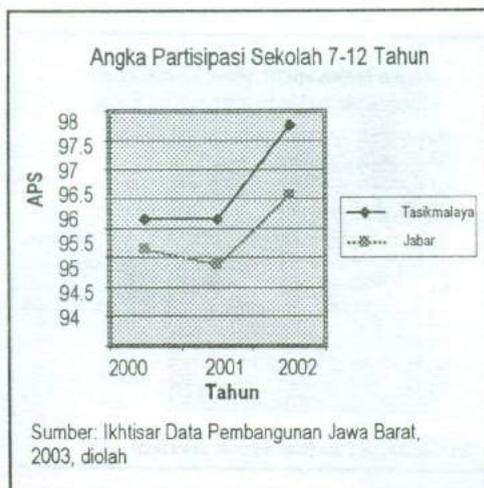
Indikator kinerja pembangunan di bidang sosial dapat dibagi ke dalam beberapa sektor antara lain yang secara langsung menyentuh masyarakat adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, kualitas dan jangkauan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses pembangunan. Operasionalisasi dari indikator ini adalah besarnya angka partisipasi sekolah, Angka Melek Huruf (AMH), rasio murid terhadap guru, dan rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan.

Sementara itu, kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur wilayah dapat dilihat dari indikator-indikator yang secara langsung memberikan daya dukung yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, prasarana jalan dan listrik merupakan indikator yang tepat untuk melihat kinerja pembangunan pada sektor ini. Operasionalisasi indikator ini adalah perkembangan panjang jalan dan rasio pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.

#### **Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi anak usia 7-12 tahun merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan pada sektor pendidikan pada Bidang Sosial. APS merupakan prosentase anak-anak usia sekolah yang bersekolah terhadap keseluruhan anak-anak usia sekolah pada usia tertentu. Dengan demikian, makin tinggi APS, berarti makin baik kinerja pembangunan bidang pendidikan. Kalauah pemekaran wilayah didasari pertimbangan yang benar tentang pemerataan pendidikan, maka pasca pemekaran wilayah APS semestinya mengalami peningkatan, karena Pemerintah Daerah akan lebih konsentrasi dengan beban kerja yang lebih kecil dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat ini.

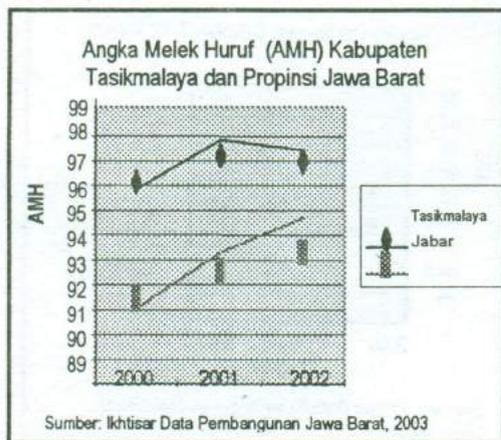
Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Tasikmalaya nampak APS sejak Tahun 2000 hingga 2002 mengalami peningkatan bahkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan APS Jawa Barat pada periode yang sama. Pada saat APS Jawa Barat menurun sekaligus yaitu pada Tahun 2001, APS Kabupaten Tasikmalaya justru mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Memperhatikan data sebagaimana tertera pada tabel di atas, nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah memeberikan kontribusi terhadap peningkatan APS di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan APS yang sangat signifikan ini disebabkan oleh penurunan jumlah anak sekolah dasar (SD) yang sangat signifikan, hal ini tercermin dari meskipun APS meningkat namun jumlah murid SD selama tahun 2001 dan 2002 mengalami penurunan, yaitu dari 174.032 menjadi 176.795. Selain itu kebijakan pemerintah baik nasional maupun daerah, berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun juga telah mendorong peningkatan APS bukan hanya di Kabupaten

Tasikmalaya, tetapi juga di Jawa Barat pada umumnya.

Kemungkinan lain, pemekaran wilayah justru telah menjelaskan keadaan ketidakmerataan jumlah anak usia sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ternyata secara umum anak-anak usia sekolah lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan yang menjadi wilayah Kabupaten Tasikmalaya.



## Angka Melek Huruf

Indikator bidang sosial pada sektor pendidikan yang kedua adalah angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf merupakan perbandingan jumlah penduduk yang mampu membaca dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Meskipun perubahan AMH memerlukan waktu yang relatif panjang, namun perubahan marginal dapat diketahui meskipun dalam waktu tahunan.

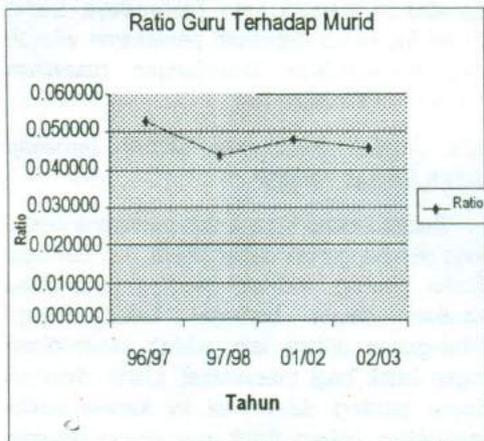
Jika pemekaran wilayah didasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dalam jangka waktu dua tahun, semestinya akan berdampak terhadap peningkatan AMH, karena AMH biasanya berbanding lurus dengan peningkatan rata-rata lamanya sekolah, sedangkan rata-rata lama sekolah berbanding lurus dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Sementara itu, sebagaimana temuan di atas, bahwa APS di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang signifikan pasca pemekaran wilayah.

Berdasarkan data tahun 2000 sampai dengan 2002, angka melek huruf Kabupaten Tasikmalaya pertama-tama meningkat lalu menurun. Sementara itu, AMH Jawa Barat selama periode tersebut mengalami peningkatan yang lebih tinggi dan tidak mengalami penurunan. Meskipun demikian AMH Kabupaten Tasikmalaya pada ketiga tahun tersebut tetap berada di atas AMH Jawa Barat.

## Rasio Guru Terhadap Murid

Untuk melihat kinerja pembangunan pada Sektor Pendidikan secara kuantitatif dapat digunakan ratio guru terhadap murid. Makin tinggi ratio guru terhadap murid berarti makin tinggi akses masyarakat terhadap pendidikan, dan makin tinggi peluang penyelenggaraan pendidikan yang

lebih berkualitas, karena guru merupakan faktor utama yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak. Argumentasi ini didasari oleh asumsi bahwa jika rata-rata murid yang ditangani oleh setiap guru sedikit atau dengan kata lain ratio guru terhadap murid besar, maka proses belajar mengajar akan makin baik dan daya sampai materi oleh guru atau daya serap materi oleh murid akan tinggi.



Nampak pada tabel bahwa ratio guru terhadap murid sebelum dan setelah ditetapkannya pemekaran wilayah mengalami fluktuasi, namun secara umum terjadi penurunan. Ini artinya bahwa, *pertama*, distribusi guru dan murid di Kabupaten Tasikmalaya sebelum dilakukan pemekaran relatif tidak merata antara wilayah yang menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan wilayah yang menjadi Kota Tasikmalaya. Wilayah yang menjadi Kabupaten Tasikmalaya saat ini, yang sebagian besar pedesaan memiliki rasio guru terhadap murid lebih kecil dibandingkan Kota Tasikmalaya, sehingga begitu dimekarkan, kesenjangan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dalam rasio guru terhadap murid terjadi. *Kedua*, meskipun kewenangan bidang

pendidikan telah diberikan kepada daerah, namun dalam hal pengangkatan dan pendistribusian guru, Pemerintah Pusat masih tetap memiliki peran yang besar, dan hal ini terbukti dengan adanya guru pusat dan guru daerah.

Dilihat dari indikator ini, dan dikaitkan dengan sebagian kewenangan penempatan guru berada pada pemerintah daerah, maka kebijakan pemekaran wilayah hanya menimbulkan kesenjangan dalam layanan pendidikan terhadap masyarakat. Masyarakat di Kota Tasikmalaya makin mempunyai peluang yang lebih besar sedangkan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya makin mempunyai peluang yang lebih kecil untuk mendapatkan layanan pendidikan.

#### Rasio Dokter Terhadap Penduduk

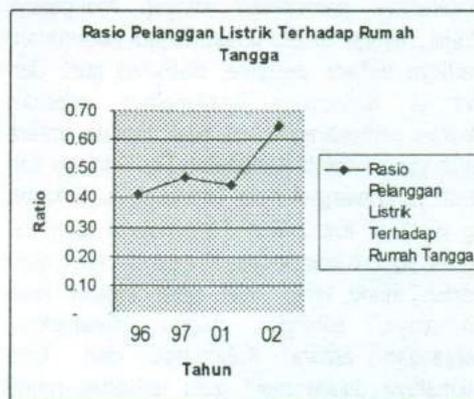
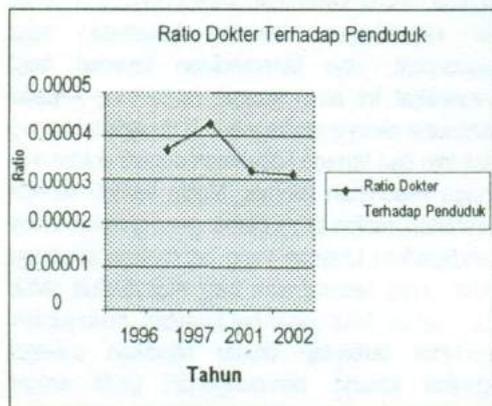
Dalam sektor kesehatan, kinerja pembangunan dapat dilihat dari keberhasilannya menciptakan kondisi masyarakat yang sehat. Indikator tersebut merupakan *outcomes* dari berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan, sehingga dalam jangka pendek indikator tersebut kurang dapat bisa diukur. Untuk itu, "indikator antara" dari berbagai program dan kegiatan sektor kesehatan antara lain dapat dilihat dari ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan ketersediaan layanan bagi masyarakat ini akan sangat tergantung kepada pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak lain dari tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Makin banyak tenaga kesehatan, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan yang berkualitas sehingga makin tinggi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup sehat. Atas dasar hal tersebut, rasio jumlah penduduk terhadap dokter dijadikan sebagai indikator kinerja pembangunan pada sektor kesehatan.

Ratio penduduk terhadap dokter menunjukkan berapa rata-rata penduduk yang harus dilayani oleh setiap orang dokter. Dengan demikian, makin sedikit rasio penduduk terhadap dokter, makin tinggi peluang masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Sebaliknya ratio dokter terhadap penduduk menunjukkan berapa peluang seorang penduduk untuk mendapatkan layanan yang diberikan oleh dokter. Makin tinggi ratio dokter terhadap penduduk, makin tinggi peluang seseorang untuk mendapatkan layanan kesehatan dari dokter. Data empirik Tahun 1996, 1997, 2001, dan 2002 menunjukkan bahwa secara umum ratio dokter terhadap penduduk di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan yang sangat berarti, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan beban seorang dokter dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Memperhatikan informasi pada gambar di atas nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah memperlihatkan terjadinya kesenjangan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Penurunan ratio dokter terhadap penduduk menunjukkan bahwa saat Kabupaten Tasikmalaya belum dimekarkan, dokter-dokter lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Tasikmalaya yang saat ini menjadi Kota Tasikmalaya. Dilihat dari sisi ini, maka kebijakan pemekaran wilayah hanya menimbulkan kesenjangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

### Rasio Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Seluruh Rumah Tangga

Dalam bidang sarana dan prasarana dasar, kinerja pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator penting. Indikator penting yang biasa digunakan dalam berbagai kajian kinerja pembangunan antara lain adalah ketersediaan jaringan listrik bagi masyarakat. Listrik dijadikan indikator penting dalam hal ini karena realita menunjukkan bahwa listrik memegang peranan penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi.



Berdasarkan data empirik Tahun 1996, 1997, 2001, dan 2002, secara umum baik jumlah pelanggan secara absolut maupun secara relatif yaitu ratio pelanggan terhadap keseluruhan rumah tangga mengalami peningkatan kecuali pada Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan layanan listrik bagi masyarakat. Data mengenai pelanggan listrik dan rasionya terhadap keseluruhan masyarakat dapat dilihat pada grafik di atas.

Berdasarkan data pada tabel di atas nampak bahwa kebijakan pemekaran wilayah telah meningkatkan konsentrasi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan listrik masuk desa. Artinya, program pembangunan listrik masuk desa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak sebelum dilakukannya pemekaran wilayah lebih terkonsentrasi di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, karena memang sebagian besar program listrik masuk desa adalah untuk wilayah pedesaan yang notabene berada di kabupaten.

### **Panjang Jalan**

Panjang jalan merupakan indikator lain untuk mengukur kinerja pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana. Indikator ini dianggap penting karena panjang jalan berhubungan dengan kemudahan akses masyarakat terhadap aktivitas khususnya perekonomian, dan makin mempertinggi hubungan atau keterkaitan antar wilayah, sehingga mobilisasi penduduk meningkat dan tarap hidup masyarakat pun makin meningkat. Selama periode 1999 sampai dengan 2002 panjang jalan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan, meskipun telah dilakukan kebijakan pemekaran wilayah, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Sebagaimana nampak pada tabel di atas, dan dikaitkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, nampak bahwa kebijakan tersebut telah meningkatkan kinerja pembangunan dalam bidang perhubungan khususnya berupa peningkatan panjang jalan. Terjadinya peningkatan indikator ini dapat dijelaskan bahwasannya dalam kondisi sebelum dilakukannya pemekaran wilayah, keterbatasan prasarana jalan terjadi di wilayah pedesaan, sehingga yang menjadi sasaran pembangunan prasarana jalan waktu itu adalah daerah pedesaan. Kemudian, setelah dilakukan pemekaran wilayah, pembangunan prasarana jalan menjadi lebih terkonsentrasi di daerah pedesaan, sehingga berdampak terhadap peningkatan panjang jalan yang signifikan.

### **Penutup**

Pemekaran wilayah untuk beberapa daerah (sebagai contoh Kabupaten Tasikmalaya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya) telah membuktikan bahwa sebelum terjadinya pemekaran wilayah terjadi kesenjangan antara wilayah yang ada di perkotaan dengan wilayah yang ada di pedesaan. Kesenjangan tersebut terjadi pada berbagai dimensi kehidupan dan sektor perekonomian, antara lain kesenjangan

pendapatan, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, dan kesenjangan sarana dan prasarana umum. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, walaupun nampak terjadi perubahan dalam semua indikator sektor pendidikan, namun perubahan tersebut lebih disebabkan karena penyebaran guru, murid, dan penduduk usia sekolah antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya semula tidak merata, sehingga ketika dilakukan pemekaran wilayah, yang terjadi adalah kesenjangan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dalam indikator-indikator sektor pendidikan tersebut.

*Kedua*, dalam Bidang Kesehatan, pemekaran wilayah pun cenderung hanya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam layanan kesehatan, karena distribusi sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan semula tidak merata, melainkan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

*Ketiga*, kebijakan pemekaran wilayah telah berdampak positif terhadap daerah yang wilayahnya sebagian besar pedesaan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti listrik dan jalan. Hal ini disebabkan program-program pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar baik sebelum maupun sesudah pemekaran wilayah diorientasikan kepada wilayah pedesaan. Dengan demikian, pemekaran wilayah berakibat terhadap pengkonsentrasian pembangunan sarana dan prasarana dasar tersebut di wilayah pedesaan.

Atas dasar hasil kajian tersebut, maka dalam menetapkan kebijakan pemekaran suatu wilayah hendaknya dilakukan studi terdahulu bukan hanya menyangkut kelayakan daerah baru yang akan dibentuk, tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan pada daerah induk. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan yang

makin mencolok antara daerah induk dengan daerah baru. Kasus pemekaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya hendaknya menjadi pelajaran, bahwa sebelum dilakukan pemekaran terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Lalu setelah dilakukan pemekaran, apabila pemerintah daerah tidak berupaya untuk mengejar ketinggalan, maka kesenjangan akan makin lebar, karena mobilisasi potensi masing-masing daerah akan tersekat dengan perbedaan teritorial kedaerahan.

Sementara itu, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi kompensasi terhadap hilangnya potensi PAD yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi tersebut dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi wilayah.

Dalam kaitan ini pula, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara mantap potensi masing-masing kawasan. Atas dasar itu, upaya pemacuan pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi potensi intinya. Kekeliruan periode sebelumnya dengan mengkonsentrasikan pembangunan di perkotaan nampaknya jangan diulang lagi, karena pengalaman membuktikan bahwa telah terjadi kesenjangan antar kawasan. Daerah perkotaan yang hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Tasikmalaya dahulu, mempunyai perkembangan yang bagus, sementara kawasan pedesaan yang merupakan sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih relatif terbelakang. Dengan

kata lain, upaya pembangunan pedesaan yang sudah mulai dirintis sejak beberapa tahun terakhir, misalnya dengan upaya pelebaran dan penambahan jalan, listrik masuk desa, dan program lainnya perlu dilanjutkan, karena program-program tersebut ternyata yang mampu menyelamatkan kinerja pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pasca pemekaran wilayah.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku dan Jurnal**

- Bryant, Coralie & Louise G. White, *Managing Development in The Third World* (diterjemahkan oleh Rusyanto L. Simatupang, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*), LP3ES, Jakarta, 1989.
- Leftwich, Richard H & Ansel M. Sharp, *Economics of Social Issues*, Forth Edition, Business Publication Inc., Dallas, Texas, USA, 1980.
- McKenzie, Richard B, *Economic Issues in Public Policies*, McGraw-Hill, USA, 1980.
- Pemkab Tasikmalaya dan BAPEDA, *Kajian Pembentukan Daerah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya*, 2000
- Pemkab Tasikmalaya dengan ITB, *Studi Penelitian Ibukota Kabupaten Tasikmalaya*, 2002
- Prud' Homme, *The Dangers of Decentralization*, The World Bank Research Observer, August, 1995
- Richardson, Harry W., *Elements of Regional Economics*, terjemahan Paul Sitohang "Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional", Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1991.

Sobandi, Baban, *Kebijakan Pembangunan Daerah: Antara Pertumbuhan dan Efisiensi*, Jurnal Wacana Kinerja, 2000

Sobandi, Baban, *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis Profesionalisme Birokrasi*, Humaniora Utama Pers, Bandung, 2004.

Wahyu Utomo, Triwidodo, *Demokrasi dan Ukuran Wilayah*, Media Indonesia, 2000.

### **Dokumen Resmi**

1. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya, 2001-2005
2. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 1996
3. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 1997
4. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2001
5. Tasikmalaya Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2002
6. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Akhir Masa Jabatan 1996/1997 s.d. 2001
7. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2001
8. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2002
9. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Taskmalaya, Tahun 2003
10. Ikhtisar Data Pembangunan Jawa Barat, Bapeda Propinsi Jawa Barat, 2003

